



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

**PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA TERHADAP
PEREKONOMIAN DESA TELUK PAMBANG KABUPATEN
BENGKALIS**



Oleh :

MUHAMMAD SUWANDI
11375104692

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara
Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: MUHAMMAD SUWANDI

: 11375104692

: ADMINISTRASI NEGARA

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DESA TELUK PAMBANG KABUPATEN
BENGKALIS

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

DEVI DESWIMAR, S.Sos, M.Si
NIP.130 411 027

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 196705121989031003

Ketua Jurusan

Administrasi Negara

DR. Kamaruddin, S.Sos. M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA

NIM

JURISAN

FAKULTAS

JUDUL

HARI/TANGGAL UJIAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MUHAMMAD SUWANDI

11375104692

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

PENGARUH PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA
TERHADAP PEREKONOMIAN DESA TELUK
PAMBANG KABUPATEN BENGKALIS

Kamis, 23 April 2020

PANITIA PENGUJI:

KETUA

Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si

NIP: 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

Penguji

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP. 19820205 2015031002

PENGUJI I

Virva Museliza, SE, M.Si

NIK. 130 712 073

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah swt yang mana berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi saritauladan bagi seluruh umat islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah subahanahu wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua, ayahanda Suprianto, dan ibunda Sariah yang selalu senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Kamaruddi, S.Sos, M.si selaku ketua jurusan Administrasi Negara semoga administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara
5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi skripsi, konsultasi proposal dan juga pembimbing akademiky yang senantiasa membimbing dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam membuat skripsi.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis Serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

7. Buat kepala desa teluk pambang kabupaten bengkalis yang telah berkenan membantu dalam pemberian data.

8. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Alfian, ainul, Zilvan, Ryan, Yudis, Iqbal, Bg jeje, Ezo, Bagus, kak dina dan Angkringan Bosku serta hesti yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD SUWANDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Konsep Pelaksanaan	9
2.2. Otonomi Daerah	14
2.3. Desa dan Kepala Desa	16
2.4. Pembangunan Desa	25
2.5. Perekonomian Desa	29
2.6. Penelitian Terdahulu	30
2.7. Pandangan Islam Tentang Pemerintahan Desa	31
2.7. Definisi Konsep	34
2.8. Konsep Operasional	35
2.9. Operasional Variabel	36
2.10 Kerangka Berpikir	38
2.11. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.3. Jenis dan Suber Data	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian	41
3.6 Metode Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1. Keadaan Geografis Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	45
4.2. Jumlah Masyarakat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	46
4.3. Pendidikan	47
4.4. Agama	49
4.5. Mata Pencarian	50
4.6. Pemerintah Desa	51
4.7. Demografi Responden	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1. Uji Kualitas Data	55
5.2. Analisis Data	56
5.3. Koefisien Determinasi	57
5.4. Pengujian Hipotesis	58
5.5. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Keterbatasan Penelitian	64
5.3. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA TERHADAP PEREKONOMIAN DESA TELUK PAMBANG KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Oleh :
MUHAMMAD SUWANDI
11375104692

Kata Kunci : Kepala Desa, Pelaksanaan, Perekonomian Desa, Teluk Pambang

Pengaruh kepemimpinan kepala desa dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penentuan dan pengambilan keputusan dalam mencapai sistim penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan benar dalam mencapai suatu tujuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya Pemerintah desa didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatankesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik dalam meningkatkan perkonomian Desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada Pengaruh Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis..Metode yang digunakan yakni pendekatan analisa kuantitatif dengan penyebaran kuisisioner, dibatasi pada objek penelitian yang dijadikan sampel yang mewakili sebagian dari populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan secara simultan,bahwa uji anova F memberikan nilai signifikan 0,000 ($p < 0,05$) karena tingkat nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, artinya secara bersama-sama pelaksanaan tugas kepala desa Teluk Pambang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian desa Teluk pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

THE INFLUENCE OF VILLAGE HEAD TASK IMPLEMENTATION ON THE ECONOMIC VILLAGE OF BENGKALIS BAY DISTRICT

ABSTRACT

By:
MUHAMMAD SUWANDI
11375104692

Keywords: Village Head, Implementation, Village Economy, Teluk Pambang

The influence of the leadership of the village head and the active participation of the community in determining and making decisions in achieving the system of governance is good and right in achieving a common goal. The implementation of village government is an effort of the village government in providing services, development in improving community welfare, through training and supervision of village government officials in implementing a system of implementation and management of the village government that is good in improving the village economy. The purpose of this research is to find out and analyze whether there is an Influence of the Implementation of the Task of the Village Head on the Village Economy in the Teluk Pambang Village, Bengkalis Regency. The results showed that based on the analysis carried out simultaneously, that the ANOVA F test gave a significant value of 0,000 ($p < 0.05$) because the level of significance was far less than 0.05, the hypothesis was accepted, meaning that together with the implementation of village head duties Teluk Pambang has a significant effect on the economy of Teluk pambang village, Bantan District, Bengkalis Regency.

UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik dipusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan perlu di laksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dan merupakan bagian internal yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Desa atau sebutan lain dari kampung, nagari, subak, bori, marga dan lainnya mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan otonomi sehingga memerlukan demokratisasi, keadilan dan pemerataan (Siagian, 2017) .

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan, Sebagai salah satu hal yang penting didalam suatu pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman yang dirasakan semakin hari semakin berkembang, tuntutan, harapan dan tanggung jawab yang diembankan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas ekonomi daerah/nasional, tingginya jumlah masyarakat urban yang menuju kota untuk mengadu nasib, pada akhirnya telah menyebabkan berbagai gejolak sosial. Hal ini tidak lain disebabkan karena tingginya konsentrasi massa pencari kerja di kota yang tidak berjalan seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia (Humaira, 2008).

Berkaca pada persoalan ini, pemerintah kemudian berinisiatif mengurangi konsentrasi massa pencari kerja di satu titik tertentu dengan jalan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah (desa). Dasar pertimbangannya adalah jika ekonomi desa semakin maju maka tentunya masyarakat tidak akan berbondong-bondong meninggalkan desa untuk mengadu nasib ke kota.

Sepintas, niat tersebut terasa sangat mulia karena adanya keinginan pemerintah mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa, Aplikasinya kemudian dilaksanakan dengan memberikan otonomi kepada desa yang disertai dengan sejumlah anggaran pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun, apabila dicermati lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya tuntutan dan harapan yang diberikan kepada pemerintah desa sangat tidak masuk di akal dan tidak terukur. Kenyataan yang dihadapi pemerintah desa saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa (Arif, 2016)..

Permasalahan yang dihadapi desa sejatinya sungguh sangat kompleks. Desa di negeri ini umumnya sangat dekat dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum. (Maret 2017- Juni 2017) Jika desa dipaksakan untuk menjadi pionir sekaligus pelaku perubahan ekonomi, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya hal ini tidak akan memberikan manfaat optimal dalam mendorong perekonomian daerah. Pada titik ini, hal utama yang mendesak diperlukan desa adalah bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian tanggung jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintah desa tidak pernah di tingkatkan.

Pada titik ini, peranan kepala desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus persoalan-persoalan yang terjadi di desa, seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara pemerintahan desa secara maksimal.

Di dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik pemerintah desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional. Jika desa tidak dikelola dengan baik maka tentu terdapat banyak masalah yang terjadi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu peranan kepala desa dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistem pemerintahan desa yang baik dan benar.

Pengaruh kepemimpinan kepala desa dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penentuan dan pengambilan keputusan dalam mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan benar dalam mencapai suatu tujuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik dalam meningkatkan perekonomian Desa.

Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai Peran Kepala Desa adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberi atau menyumbangkan sesuatu untuk desanya sendiri baik itu berupa fisik, dana, maupun pikiran. Terkadang setiap keputusan yang diambil tidak dapat sepenuhnya diterima oleh semua masyarakat yang disebabkan adanya pengaruh – pengaruh dari luar yang menginginkan keputusan tersebut diubah. Sehingga hal ini dapat berpengaruh juga dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Teluk Pambang serta kurangnya sarana dan fasilitas penunjang yang mendukung kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

Salah satu bagian dari pemerintahan Daerah adalah diberlakukannya Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Pasal 26 ayat 4 huruf (h) disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD).
- b. Kepala Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- c. Kepala Desa meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa.
- d. Kepala Desa mampu mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sejumlah tugas Kepala Desa di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis, penulis menemukan masalah perekonomian desa di Desa Teluk Pambang seperti :

- a. Masih terdapatnya pembagian bantuan yang belum terdistribusi secara merata pada masyarakat miskin, seperti pada program rumah bantuan dan pada pembagian beras untuk masyarakat miskin (raskin), hal ini terlihat dari penerima bantuan beras bukanlah orang yang miskin namun tergolong masih mampu.
- b. BUMD di desa Teluk Pambang belum berkembang dengan baik hal ini dikarenakan kepala desa terindikasi kurang mampu dalam memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam meningkatkan dan mengelola BUMD.
- c. Belum adanya transparansi/keterbukaan terhadap laporan keuangan desa.
- d. Masih adanya lahan yang tersisa di desa namun belum dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)

Selain itu, permasalahan lainnya yakni program-program strategis seperti penanganan masalah kemiskinan masih terpusat pada kota-kota besar, belum maksimal menyebar ke daerah-daerah, apalagi pedesaan. Kenyataan ini telah dibuktikan dengan tingkat keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Bukti tersebut dapat kita lihat pada indeks penurunan kemiskinan penduduk perkotaan yang lebih tinggi dari pada penduduk pedesaan yakni 0,09 juta orang bagi penduduk miskin perkotaan, dan 0,04 juta orang bagi penduduk pedesaan. (Sumber BPS periode Maret - September 2016).

Salah satu contoh Desa yakni Desa Teluk Pambang. Desa ini terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Desa Teluk Pambang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Fenomena yang ada di desa Teluk Pambang yaitu belum maksimalnya peran kepala desa dalam meningkatkan perekonomian rakyatnya, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat desa Teluk Pambang yang berada dalam taraf ekonomi menengah kebawah selain itu permasalahan yang terjadi di Desa Teluk Pambang yaitu pembagian bantuan yang tidak merata, bantuan tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, masih ada

orang yang mampu namun menerima bantuan, sedangkan masih banyak yang ekonominya rendah tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Tabel I.1 Data Masyarakat Kecamatan Bantan

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Jumlah KK
1	Bantan Tengah	1.699	1.644	3.343	1.012
2	Bantan Air	1.109	1.030	2.139	689
3	Bantan Tua	1.400	1.329	2.729	761
4	Teluk Pambang	654	673	1.327	475
5	Selat Baru	2.195	2.032	4.227	1.258
6	Teluk Lancar	1.060	983	2.043	572
7	Kembung Luar	1.205	1.088	2.293	670
8	Jangkang	1.265	1.112	2.377	670
9	Muntai	984	870	1.854	542
10	Resam Lapis	792	791	1.583	463
11	Berancah	1.475	1.343	2.818	788
12	Ulu Pulau	881	796	1.677	490
13	Mentayan	581	539	1.120	348
14	Pambang Pesisir	696	686	1.382	377
15	Sukamaju	1.140	1.031	2.171	572
16	Pambang Baru	792	707	1.499	444

Sumber : Kantor Camat Bantan

Tabel I.2 Usaha-Usaha/Program Perekonomian Masyarakat Desa Teluk Pambang

No	Jenis Usaha
1	Menganyam Tikar Pandan
2	Pembuatan Kerupuk Ikan
3	Pembuatan Keripik Pedas Bengkalis
4	Pembuatan tas dari tali Kur

Pada tabel I.1 terlihat bahwa Desa Teluk Pambang yang merupakan salah satu desa di kecamatan Bantan memiliki jumlah penduduk 1327 dengan berjenis kelamin laki-laki sejumlah 654 orang dan masyarakat berjenis kelamin perempuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah 673 orang. Pada tabel I.1 dapat diketahui masyarakat di desa Teluk Pambang lebih sedikit dibandingkan desa di kecamatan Bantan lainnya.

Melihat fenomena permasalahan diatas dapat dilihat bahwa keseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan hingga pelosok pedesaan masih dipertanyakan di samping menjadi salah satu bukti bahwa instabilitas ekonomi desa masih menjadi salah satu akar permasalahan dari tingginya angka urbanisasi setiap tahun. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian **“Pengaruh Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemaparan dan kenyataan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Memiliki Pengaruh Terhadap Perekonomian Desa Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi:

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis

D. Manfaat Penelitian

Apapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam Pengaruh Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama serta sebagai tambahan penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah..

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub, seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan pokokpokok bahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian Partisipasi otonomi daerah, konsep Desa, konsep tugas dan peranan kepala desa, pengertian pembangunan perekonomian desa, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepala Desa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Geografi Desa Teluk Pambang, Demografi, Pemerintahan Desa Teluk Pambang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, dimana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Selain itu Moekijat (1996:12) pelaksanaan tugas adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan tiap pegawai. Adapun Dharma (1995:9) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan As'ad (2000:65) pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat di bagi menjadi:

1. Kualitas pelayanan.
2. Kuantitas pelayanan.
3. Waktu pelayanan.
4. Jabatan yang dipegang.
5. Absensi kerja.
6. Keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.

Selain itu Winardi (1999:75) mengatakan ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu:

1. Pemanfaatan waktu yang cepat.

Pekejaan atau tugas yang dilakukan haruslah mempunyai langkah-langkah yang harus dijalankan agar tugas yang dilakukan bisa mendapatkan hasil yang ingin dicapai guna untuk mendapatkan metode yang cocok dalam memanfaatkan waktu dalam suatu kepemimpinan pelaksanaan tugas tersebut.

2. Jumlah output.

Dalam hal ini jumlah output pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia mengaju pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah capai, serta ukuran berhasil tidaknya satu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketersediaan untuk bekerjasama.

Dalam sebuah organisasi haruslah ada kerjasama antara atasan dengan bawahannya agar mendapat kinerja yang baik. Hal ini akan dilihat dari adanya kerjasama antara pimpinan dan sesama pimpinan, dan pimpinan dengan bawahannya.

4. Kualitas pekerjaan

Segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau hasil kerja yang diperoleh hal ini dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, kelengkapan yaitu dapat dilihat dari adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan kerapian dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa besar atau hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa diberikan kewenangan dalam rangka terlaksananya tugas tersebut.

Selain itu Talizuduhu (1990:20) memberikan pengertian dari beberapa tugas Kepala Desa diantaranya yaitu menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Berhubung Kepala Desa serta perangkat desa menjadi penentu kebijakan dan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan pemerintahan desa dituntut untuk mempunyai kemampuan dan berperaan aktif dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya dan melaksanakan wewenangnya. Kewenangan tersebut diantaranya, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan bersama BPD. Wijaya (2003:31) mengatakan bahwa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala Desa dapat mengkoordinir seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa dikatakan berhasil apabila kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan. Dengan dilaksanakan tugas kepala Kepala Desa dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan benar- benar dapat merasakan keberadaan Kepala Desa yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban sebagaimana mestinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kencana (2003:27) bahwa pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, sebagaimana kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah Desa yaitu mendapatkan pelayanan yang layak. Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan secara partisipatif, tentunya harus melibatkan masyarakat itu sendiri pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan harus didukung oleh masyarakat itu sendiri.

2. Otonomi Daerah

Secara etimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Autos* dan *Nomos*. *Autos* berarti sendiri, dan *Nomos* berarti aturan. Jadi, otonomi bermakna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri (Widarta, 2001:2).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berdasarkan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Nurhidayat, 2005:90).

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah harus menghormati otonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2005:165). Dalam UU RI No. 32 Tahun 2004/Bab XI/Tentang Desa menjelaskan:

Pasal 200

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atau prakarsa masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.3 Desa dan Kepala Desa

Kata “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe seorang Belanda yang merupakan pembantu gubernur Inggris yang menyebut tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. (Soetarjo, dalam Sadu Wasistiono, 2007 : 7).

Menurut Yulianti (2003 : 24) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang berujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai dengan penjelasan diatas jelaslah bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang masih asli adat tradisinya, sosial kemasyarakatannya masih murni, dan rasa semangat kegotong-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rongannya sangat kuat yang dipimpin seorang kepala desa sebagai satu kesatuan hidup dan dengan kesatuan norma, serta memiliki wilayah hukum yang jelas dengan memiliki batas-batas yang sah. Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan suku bangsa banyak kita jumpai istilah-istilah desa.

Menurut Suhartono (2000 : 12) ditinjau dari segi ekonomi desa merupakan sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi. Pendapat diatas menjelaskan bahwa desa merupakan kelompok sosial ekonomi kecil yang berasaskan ikatan kekeluargaan dimana rasa saling tolong-menolong dan rasa setia kawan sosial lebih diutamakan.

Menurut Kansil (2001 : 21), desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. (Sadu Wasistiono, 2007 : 69).

Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah-daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda kulturenya. Kewenangan desa menurut Undang-Undang No 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Menurut Undang-undang ini juga menjelaskan Pemerintahan desa terdiri dari :

1. Kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris Desa atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Dalam pasal 203 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung dari penduduk desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan dan sebagai pemerintahan yang paling dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Disamping itu sebagai pemimpin, kepala desa juga memiliki fungsi sebagai pelopor, penggerak, perencana, penggagas, bahkan sebagai pelaksana pembangunan di desa yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi kepemimpinan di atas jelaslah bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus membawa perubahan desa yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik, sebab bila salah langkah desa yang dipimpinnya akan menjadi tidak berkembang bahkan mengalami ketertinggalan dari desa-desa lainnya. Kepala desa harus benar-benar mengurus, mengatur, mengarahkan dan memimpin serta bertanggung jawab terhadap komitmennya sebelum dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin.

Penulis berpendapat yang dimaksud pemimpin dalam hal ini adalah Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap transparansi terhadap masyarakat yang dipimpinnya sehingga tidak terjadinya kesalah pahaman informasi, dan lebih memperhatikan masyarakat karena pada saat sekarang masyarakat banyak menggantung perkembangan pembangunan desa pada pemerintah daerah sepenuhnya. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kepala desa harus sesuai dengan visi, misi awal kepala desa. Yang dimaksud yaitu kepala desa yang berada di Desa Teluk Pambang yang mengatur dan mengurus pembangunan di desanya

a. Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2015, menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai fungsi antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Desa.
3. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Desa.
5. Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan
6. Menetapkannya Sebagai Peraturan Desa dengan Persetujuan BPD.

Talizuduhu Ndraha (2005 : 5) mengatakan bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan. Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa. Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat.

4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa. Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi); sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya. Ringkasnya tugas pokok dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- a. Membagi tugas kerja.
- b. Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja.

5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaransasaran dan tujuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sejalan dengan pendapat Ndraha diatas, sebagai pelaksana pembangunan fungsi kepala desa disamping selaku aparatur pemerintahan kepala desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa. Pembangunan akan berhasil apabila kepala desa menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 159) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari perencanaan, penggerak dan motivator, pengambilan keputusan, memberikan komunikasi yang jelas, dan pengawasan, serta penilaian dari kepala desa. Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 88) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter dalam Ernie Tisnawati Sule (2004 : 96) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan demi tujuan organisasi.

Menurut Manulang (2004 : 45) untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang mesti dilalui, yaitu : Menetapkan tugas dan tujuan, Mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesi, dan menyusun rencana. Sesuai dengan pendapat diatas kepala desa harus merencanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan program pembangunan desa. Perencanaan yang baik apabila kepala desa menentukan proses, program, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan program pembangunan kepala desa selaku penggerak dan pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan. Penggerakan atau motivasi adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rup sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. (Sagian, 2003: 106).

Motivasi yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk sumbangan uang, benda, tenaga, dan pikirannya serta ide-ide cemerlang yang berguna bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. Arnoft dan Novack (dalam Andi Yusran, 2007 : 11).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan pembangunan kepala desa harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan program perencanaan pembangunan.

S.P. Siagian (2003 : 39) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data, yang relevan dengan masalah yang dihadapi, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil.

Dari beberapa definisi diatas, penulis berpendapat bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala desa sebagai perencana, penggerak, pengambil keputusan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa dalam program pembangunan. Semakin baik dan tinggi dalam menjalankan peranan serta fungsinya sebagai kepala desa, maka semakin baik dan berhasil pula pembangunan desa yang direncanakan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak berfungsi dengan baik maka perencanaan pembangunan pedesaan akan terkendala.

Kepala desa adalah sebagai pemimpin masyarakat desa dan menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan didesanya karena dia harus menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan. Pada dasarnya kepemimpinan kepala desa itu adalah suatu kemampuan kepala desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan didesa yang dipimpinnya.

2.4 Pembangunan Desa

Mengenai Istilah pembangunan, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Berikut beberapa batasan dari para ahli yang dapat menggambarkan bahwa pengertian pembangunan ternyata banyak diambil dari sudut pandang yang berlainan antara lain :

Menurut Sufian Hamin (2003: 56) pembangunan adalah suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik. Menurut Afiffudin (2010:42) pembangunan dapat diartikan dalam lima arti yaitu perubahan, pertumbuhan, rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, rencana yang tersusun secara rapi, dan cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.

Menurut Nugroho (2033:67) pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga Negara dan dunia internasional dengan menyerap hampir seluruh sumber daya negara dan bangsa.

Sondang P. Siagian (2001: 4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial budaya
4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Brata kusuma, 2005:23).

Semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruhan aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

2. Perkonomian Desa

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar (2005 : 84) mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet (dalam Suryana, 2006 : 6) pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan.

Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar. Potensi ekonomi dalam hal ini adalah sumber daya desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya peran dan prakarsa pemerintah masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa.

Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha – usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.

Dari data yang telah diperoleh penulis disini mengenai ekonomi diperoleh sebagai berikut :

1. Bidang Perkebunan

Desa Teluk Pambang memiliki lahan perkebunan yang potensial, dengan hasil perkebunan berupa kelapa, pinang dan karet., Namun masyarakat juga memiliki lahan yang mereka miliki sendiri yang hasil panennya digunakan untuk keperluan sendiri ataupun di perdagangkan. Pada umumnya komoditas yang ditanam adalah tanaman yang dapat memberi kemudahan baik dari segi perawatannya, pengolahannya serta dari segi pendapatan.

2. Bidang Perikanan

Hasil produksi perikanan Desa Teluk Pambang seperti, ikan, udang, ketam dan lain – lain, Keadaan geografis Desa Teluk Pambang yang berada dipesisir laut memberikan potensi hasil perikanan yang melimpah.

3. Bidang Usaha Kecil Masyarakat (UKM)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat di Desa Teluk Pambang aktif mengadakan kelompok UKM seperti usaha keripik singkong, pembuatan kerupuk ikan, menganyam tikar dan masih banyak lagi. Kegiatan UKM ini dapat menjadi suatu hal yang menunjang perekonomian desa.

4. Bidang Perdagangan

Di Desa Teluk Pambang ini dikenal dengan adanya pasar tradisional milik orang setempat yang sering dilaksanakan pada hari minggu, dan orang dari daerah di sekitar sering mengunjungi pasar ini. Pasar tradisional ini menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka semuanya.

Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan, tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Debbby K.A.Pangke (2015)	Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	Meneliti Tentang Peran/tugas Kepala Desa	Fokus penelitian penulis terhadap peran/tugas Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian desa sedangkan pada jurnal untuk pembangunan desa
Okta Hendrik (2013)	Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau	Meneliti Tentang Peran/tugas Kepala Desa	Fokus penelitian penulis terhadap tugas Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian desa sedangkan pada jurnal untuk pembangunan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fitrisari Jonebe (2016)	Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Koordinasi Pembangunan Secara Parsipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	Sama-sama Meneliti Tentang Tugas Kepala Desa	Perbedaannya, penulis melihat pelaksanaan tugas kepala desa dalam meningkatkan perekonomian desa, sedangkan pada jurnal membahas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan
Kunnica Fatku Rohmah (2013)	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)	Sama-sama membahas mengenai tugas kepala desa	Perbedaan terletak pada konsep teori, penulis menggunakan teori pelaksanaan sedangkan jurnal memakai teori implementasi
Sri Ulina (2014)	Tugas dan Fungsi Kepala Desa beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang	Sama-sama membahas mengenai tugas kepala desa	Perbedaannya penulis hanya membahas mengenai kepala desa sedangkan pada jurnal juga membahas mengenai perangkat desa serta penulis melihat pelaksanaan tugas kepala desa dalam meningkatkan perekonomian desa sedangkan pada jurnal membahas mengenai peningkatan kinerja kantor desa

2.7 Pandangan Islam Tentang Pemerintahan Desa

Secara teoritis etika pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, yang dibangun atas realitas Keindonesiaan yang sudah sekian abad lamanya bersemayam dalam dada bangsa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, yaitu realitas kemajemukan sosial, budaya dan agama. Adapun sumber nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri sesungguhnya adalah agama. Oleh karena itu, dalam menghadapi proses pembangunan yang senantiasa mengalami perubahan terus menerus ini, etika agama diharapkan dapat memberikan sumbangan amat berharga dalam rangka memelihara dan menjaga keseimbangan dalam etos pembangunan.

Dalam kaitan ini tampak bahwa etika agama sesungguhnya merupakan pendukung etika Pancasila itu. Dan didalam hubungannya dengan pembangunan manusia seutuhnya panggilan etika agama dalam rangka memperkuat etika Pancasila terasa sangat penting. Tanpa bermaksud memitoskan mayoritas, tentunya etika Islam mampu nyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika Pancasila, yang sekaligus merupakan dasar dan filsafat pembangunan.

Pada saat kita menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya serta ketaatan Kepada Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَّزَعْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. (Q.S. al-Nisa: 59).

Ahmad Musthafa Al- Maraghi mengomentari ayat ini sebagai berikut:

”Taatilah Allah dan beramalah dengan berpedoman kitab Allah; dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya Dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para Rasul itu bertugas untuk menjalankan syari’at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rasul itu bertanggungjawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan atas kaum Muslimin untuk menaati Rasul. Pengertian taatilah Uli Amri adalah para penguasa ahli - ahli hukum, para ulama, panglima-panglima, para pemimpin dan para zu’ama. Mereka ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan -ketentuan yang dibawa oleh Rasul dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh. Apabila

Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan RasulNya, yang telah diketahui secara mutawatir. Sesungguhnya mereka (Ulil Amri) adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam realitasnya, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum tidak terlepas oleh kinerja pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dibantu pelaksanaannya dengan tugas pembantuan pemerintah pusat ke daerah dan desa, sehingga pembangunan di tingkat nasional banyak dipengaruhi oleh faktor kinerja pemerintahan daerah dan desa. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan terutama di desa sangat besar pengaruhnya oleh kerja aparaturnya pemerintah desa itu sendiri.

2.7 Definisi Konsep

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Desa adalah tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Operasional

Adapun beberapa konsep operasional yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat.
- b. Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.
- c. Kepala Desa adalah Seseorang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang hidup di desa tersebut.
- d. Peran Kepala Desa adalah Peran seseorang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengambil beberapa keputusan guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang hidup di desa tersebut
- e. Perekonomian Desa adalah taraf kesejahteraan masyarakat desa



2.9 Operasional Variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Variabel	Indikator	Subindikator
Pelaksanaan tugas adalah beberapa hal yang harus dilakukan atau dipertanggungjawabkan pada masa jabatan yang berlangsung (Kansil, 2001:23)	1. Mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah	a. Kepala desa memberikan saran dan masukan mengenai PAD b. Kepala desa mengawasi pengelolaan PAD c. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan sumber PAD
	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan BUMD	a. Mendirikan BUMD b. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMD c. Mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomiannya melalui pendirian BUMD
	3. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	a. Melakukan sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat b. Memberikan sarana dan prasarana dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
	4. Mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian	a. Mencari lahan desa yang dapat dikelola menjadi sumber PAD
		b. Mendorong bidang pertanian desa dalam meningkatkan PAD
Perekonomian Desa adalah sektor pendapatan dan kehidupan desa yang dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat desa (Kansil,	a. Kesejahteraan sektor mata pencaharian	a. Adanya peluang mata pencaharian bagi masyarakatnya b. Peningkatan sektor-sektor ekonomi didesanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

2003:25)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

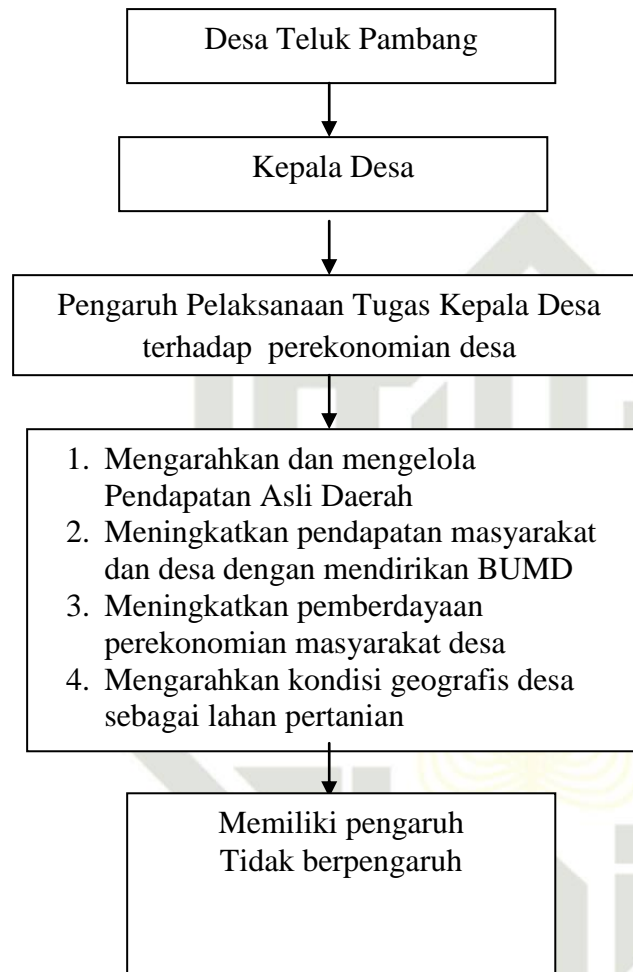
	<p>b. Tingkat pendidikan masyarakat</p> <p>c. Tingkat kesehatan masyarakat</p>	<p>c. Tersedianya sarana prasarana mata pencaharian bagi masyarakat desa</p> <p>a. Masyarakat menyelesaikan program wajib belajar</p> <p>b. Tersedianya sarana prasarana pendidikan bagi masyarakat desa</p> <p>a. Masyarakat desa memiliki fasilitas kesehatan didesanya</p> <p>b. Masyarakat memiliki kemampuan berobat secara mandiri</p>
--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berpikir



2.11 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu : Pelaksanaan tugas Kepala Desa Teluk Pambang memberikan pengaruh terhadap perekonomian desa Teluk Pambang Kecamatan Bentan Kabupaten Bengkalis.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif, dimana metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan hitungan berupa angka dan memerlukan pengolahan data secara statistis, Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda karena memiliki variabel lebih dari dua dan pengumpulan data menggunakan teknik angket.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantan Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis. Alasan peneliti memilih Desa Teluk Pambang menjadi lokasi karena peneliti melihat ada permasalahan perekonomian desa di Desa Teluk Pambang seperti ketidakmerataan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, Kepala Desa kurang memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, hal ini terlihat dari sulitnya masyarakat dalam melakukan pinjaman modal usaha ke koperasi desa.

3.3 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden. Data subjek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan salah pengalaman atau karakteristik seseorang atau kelompok atau kelompok orang yang menjadi subjek atau responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, berupa kuisioner.

b. Data skunder

Data skunder merupakan data pendukung data primer yang peroleh dari instansi terkait dan data yang diperoleh secara tidak langsung, (melalui perantara), diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengambil data serta informasi yang dilakukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Kuisioner yaitu pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan kuosioner yaitu dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dan kuesioner tersebut akan diantar langsung ke responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-item



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan kepada responden pada saat pengisian kuesioner tersebut dilakukan.

- b. Dokumentasi yaitu membuat bukti berupa dokumentasi penelitian baik berupa foto ataupun rekaman wawancara.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 1999:72). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh masyarakat Desa Teluk Pambang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 1999:73). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dari rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Populasi masyarakat di Desa Pambang Kecamatan Bantan Bengkalis yakni berjumlah 128.134 KK (Sumber : Kantor Desa Pambang, 2017), sehingga jumlah sampel yang diambil yaitu:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{128.134}{1 + 128.134 \times (0.01)^2} \\
 &= \frac{128.134}{1 + 320,335} \\
 &= 100 \text{ KK}
 \end{aligned}$$

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan teknik *Sampling Insidental*, dimana *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2. Metode Analisa Data

Analisis data sangat diperlukan oleh seorang peneliti dalam memecahkan kasus yang ditelitinya karena tanpa analisa data peneliti akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penelitiannya. Analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi sederhana, yaitu metode analisis untuk satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 17. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2006).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghozali (2006) kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2006).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini bertujuan mengukur seberapa jauh model regresi dapat menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Nilai koefisien R^2 antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Ghozali, 2006). Nilai mendekati satu, berarti hampir semua variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen.

d. Uji Statistik F

Uji Statistik F mengukur apakah semua variabel independen yang ada pada penelitian mempunyai pengaruh secara bersama, simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pada derajat 5%, hipotesis alternatif diterima dan semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

e. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t digunakan menguji pengaruh variabel independen masing-masing. Dengan menggunakan t tabel, pada uji t, nilai t yang dihitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hipotesis awal diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila besarnya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka hipotesis awal (H_a) ditolak dan H_0 diterima (Ghozali, 2006;51).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelaksanaan tugas Kepala Desa terhadap perekonomian desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Lingkup penelitian ini hanya difokuskan pada desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis

4.1 Keadaan Georafis Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Desa Teluk Pambang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan luas wilayah 2622, 669 hektar (ha), sebagian besar terdiri dari tanah pemukiman, perkebunan, fasilitas umum desa dan tanah basah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 . berikut ini :

Tabel 4.1
Persentase Lahan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

No	Penggunaan	Luas Lahan	Persentase
1	Tanah Kering	2,327	88,73
2	Tanah Basah	277	10,56
3	Tanah Perkebunan	18,169	0,69
4	Tanah Fasilitas Umum	0,5	0,02
Jumlah		2622,669	100

Sumber :Kantor Kepala Desa, 2019

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa lahan di desa teluk pambang sebagian besar adalah tanah kering yaitu tanah pemukiman seluas 2,327 ha dengan persentase 88,73 %, untuk tanah basah seperti rawa dan tanah pasang surut seluas 277 ha dengan persentase 10,56 %, kemudian tanah perkebunan seperti tanah perkebunan rakyat dan tanah perkebunan swasta seluas 18,169 dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentase 0,69 % dan fasilitas umum seperti tanah perkantoran pemerintah hanya memiliki lahan sebesar 0,5 % ha dengan persentase 0,02 %.

Desa Teluk Pambang terletak disebelah timur ibu kota kecamatan bantan.

Adapun batas wilayah desa teluk pambang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan desa muntai
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa kembung luar
- Sebelah barat berbatasan dengan desa pematang duku
- Sebelah timur berbatasan dengan laut selat Melaka

4.2 Jumlah Masyarakat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Jumlah masyarakat berdasarkan profil Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 tentang jumlah masyarakat Desa Teluk Pambang sebagai berikut : berjumlah 3707 orang yang terdiri dari lakilaki sebanyak 1865 orang, perempuan sebanyak 1799 orang, janda sebanyak 32 orang dan duda sebanyak 11 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 265 KK.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2
Jumlah Masyarakat Desa Teluk Pambang Tahun 2018/2019

No	RW	Jumlah
1	01 (Sungai Raya)	432
2	02 (Sukajadi)	332
3	03 (Banan)	346
4	04 (Sungai Rambai)	460
5	05 (Parit I)	454
6	06 (Parit II)	322
7	07 (Parit III)	449
8	08 (Parit III)	432
9	09 (Parit III)	480
	Jumlah	3707

Sumber : Kantor Kepala Desa, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Teluk Pabang yang paling banyak adalah tinggal di RW (09) Parit III yaitu 480 orang sedang di RW (01) Sungai Raya berjumlah 432 orang dan RW(02) Sukajadi berjumlah 332 orang, di RW (03) Banan berjumlah 346 orang dan di RW (04) Sungai Rambai berjumlah 460 orang sedangkan di RW (05) Parit I berjumlah 454 orang dan di RW (06) yaitu 322 orang, RW (07) berjumlah 449 orang, RW (08) berjumlah 432 orang.

Kemudian, pada Tabel 4.3 akan menjelaskan tentang jumlah klasifikasi masyarakat Desa Teluk Pambang menurut kelompok umur :

Tabel 4.3
Klasifikasi Usia Masyarakat Desa Teluk Pambang

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah
1	>10	467
2	10-20	752
3	20-30	1097
4	30-40	624
5	>40	767
Jumlah		3707

Sumber :Kantor Kepala Desa, 2019

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa dominan masyarakat Desa Teluk Pambang berusia 20 – 30 tahun sejumlah 1097 orang, untuk masyarakat yang berusia > 10 tahun sebanyak 467 orang, usia remaja 10-20 tahun berjumlah 752 orang, Masyarakat berusia 30-40 tahun sebanyak 624 orang dan masyarakat dengan usia >40 tahun sejumlah 767 orang.

4.3 Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat sosial serta perekonomian masyarakat. Pendidikan masyarakat Desa Teluk Pambang dapat dikatakan sudah mulai berkembang dengan baik. Karena pada masa sekarang masyarakat desa Teluk Pambang banyak yang sudah bersekolah hingga ke perguruan tinggi walaupun masih ada beberapa dari mereka hanya tamatan SLTA namun sudah bisa membaca dan menulis.

Tabel 4.4
Jumlah sarana Pendidikan di Desa Teluk Pambang

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	SMA sederajat	3
2	SMP sederajat	2
3	SD sederajat	12
4	TK	3
5	TPA	23
Jumlah		43 unit

Sumber : Kantor Kepala Desa, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Teluk Pambang sudah memadai dilihat dengan adanya 3 unit SMA/Sederajat, 2 Unit SMP/Sederajat, 12 Unit SD/Sederajat, 3 Unit TK dan 23 Unit TPA. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Pambang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	92
2	Tidak Sekolah	65
3	Tidak Tamat SD	76
4	Tamat SD	98
5	Tamat SMP	176
6	Tamat SMA	387
7	Perguruan Tinggi	243

Sumber : Kantor Kepala Desa, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dominan masyarakat desa Teluk Pambang merupakan tamatan SMA sebanyak 387 orang, kemudian diikuti yang lulusan perguruan tinggi sebanyak 243 orang, keudia tamatan SMP176 orang,tamat SD 98 orang. sementara sisanya belum bersekolah dan tidak sekolah.

4.4 Agama

Pada masa dahulu masyarakat desa Teluk Pambang dikenal banyak menganut kepercayaan animistik. Tetapi pada masa sekarang masyarakat ini telah banyak menganut agama Islam. Pengaruh agama Islam ini mereka terima dari kalangan pedagang yang banyak datang dan menetap ke daerah ini, kemudian ada beberapa dari mereka yang melakukan kawin silang atau yang disebut peranakan. Jumlah masyarakat Desa Teluk Pambang berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Masyarakat Desa Teluk Pambang Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3288
2	Kristen	275
3	Budha	132
4	Hindu	12

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Teluk Pambang adalah beragama Islam dengan jumlah 3288 orang sedangkan masyarakat beragama kristen ada 275 orang serta masyarakat dengan agama budha sebesar 132 orang dan sisanya Hindu hanya sekitar 12 orang.

Adapun sarana rumah ibadah yang terdapat di Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Rumah Ibadah Desa Teluk Pambang

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7 unit
2	Musholla	12 unit
3	Wihara	3 unit
4	Gereja	2 unit

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rumah Ibadah Mesjid yang terdapat di Desa Teluk Pambang sebanyak 7 Unit, Musholla sebanyak 12 Unit, adapun Wihara sebanyak 3 Unit dan Gereja 2 unit.

4.5 Mata Pencarian

Mata pencaharian pokok masyarakat desa Teluk pambang adalah bertani sayur-sayuran, petani kelapa, pinang dan karet. Selain itu ada yang bekerja sebagai buruh yaitu mengumpulkan hasil hutan (menebang kayu bakau) dan dibarengi dengan berburu binatang, baik didarat maupun dipinggiran sungai. Orang Asli tidak mengenal sistem perladangan secara menetap. Pengambilan hasil hutan yang ada di tepi-tepi pantai biasanya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Penangkapan ikan atau binatang laut lainnya mereka lakukan dengan cara sederhana, misalnya dengan memasang perangkap ikan seperti lokah, jaring dan jala. Mata pencarian masyarakat Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Mata Pencarian Masyarakat Desa Teluk Pambang

No	Jenis Mata pencarian	Jumlah
1	Bertani	532
2	Beternak	214
3	Berdagang	187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Buruh	135
5	Lain-lain	129

Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas dari mata pencarian masyarakat desa Teluk Pambang adalah bertani yaitu 532 orang kemudian berternak yaitu 214 orang, sedangkan berdagang 187 orang, untuk buruh sebesar 135 orang dan sisanya 129 orang memiliki mata pencarian yang lain.

4.6 Pemerintah Desa

Sistem pemerintahan desa teluk pambang sesuai dengan Undang-undang dan Perda Kabupaten Bengkalis, bahwa desa dipimpin oleh satu kepala daerah yaitu kepala desa yang dilantik oleh bupati kemudian dibantu oleh BPD dan dibawahnya dibantu oleh sekretaris desa beserta staf. Untuk mempermudah roda pemerintahan dan pembangunan dibentuk beberapa Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Ekonomi, Kaur Umum dan Kaur Keuangan kemudian didukung oleh masing-masing kepala dusun didesa teluk pambang ini.

4.7 Demografi Responden

Pelaksanaan hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengantarkan kuisisioner secara langsung kepada responden. Penyebaran kuisisioner dimulai dari tanggal 04 November 2019 dan selesai pada tanggal 07 November 2019. Total kuisisioner yang dibagikan yaitu 100 buah kuisisioner. Kuisisioner yang kembali sebanyak 100 buah (100 %). Setelah dilakukan pemeriksaan semua kuisisioner yang kembali terisi dengan lengkap sehingga layak untuk dianalisis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.9
Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Data	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	100	100
Kuisisioner yang kembali	100	100
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0
Kuisisioner yang tidak dapat dianalisa	0	0
Kuisisioner yang dapat dianalisa	100	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Karakteristik responden meliputi umur, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan status dari responden pada yang diteliti. Adapun karakteristik responden masyarakat Desa Teluk Pambang yang menjadi sampel penelitian yakni, dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4. 10
Data Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Umur		
20 – 30 tahun	7	7
31 – 40 tahun	45	45
41 – 50 tahun	48	48
Total	100	100
Pekerjaan		
PNS/Polri	14	14
Guru	24	24
Wiraswasta	62	62
Total	100	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	47	47
Pempuan	53	53
Total	100	100
Pendidikan Terakhir		
Sekolah Dasar	9	9
Sekolah Menengah Pertama	26	26
Sekolah Menengah Atas	45	45
Lainnya	20	20
Total	100	100



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status		
Menikah	64	64
Belum Menikah	24	24
Berceraai	12	12
Total	100	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.10 dapat kita ketahui bahwa responden berumur 31-40 tahun sebanyak 45 orang (45%), sedangkan responden berumur 41-50 tahun sebanyak 48 orang dan yang paling sedikit yakni responden berumur 21-30 tahun sejumlah 7 orang atau sekitar 7 %.

Karakteristik responden dilihat dari pekerjaan yaitu: responden yang memiliki pekerjaan PNS/Polri sejumlah 14 orang atau 14%, kemudian untuk responden dengan pekerjaan guru sebanyak 24 orang atau 24% dan sisanya didominasi dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 62 orang atau 62% responden memiliki pekerjaan wiraswasta.

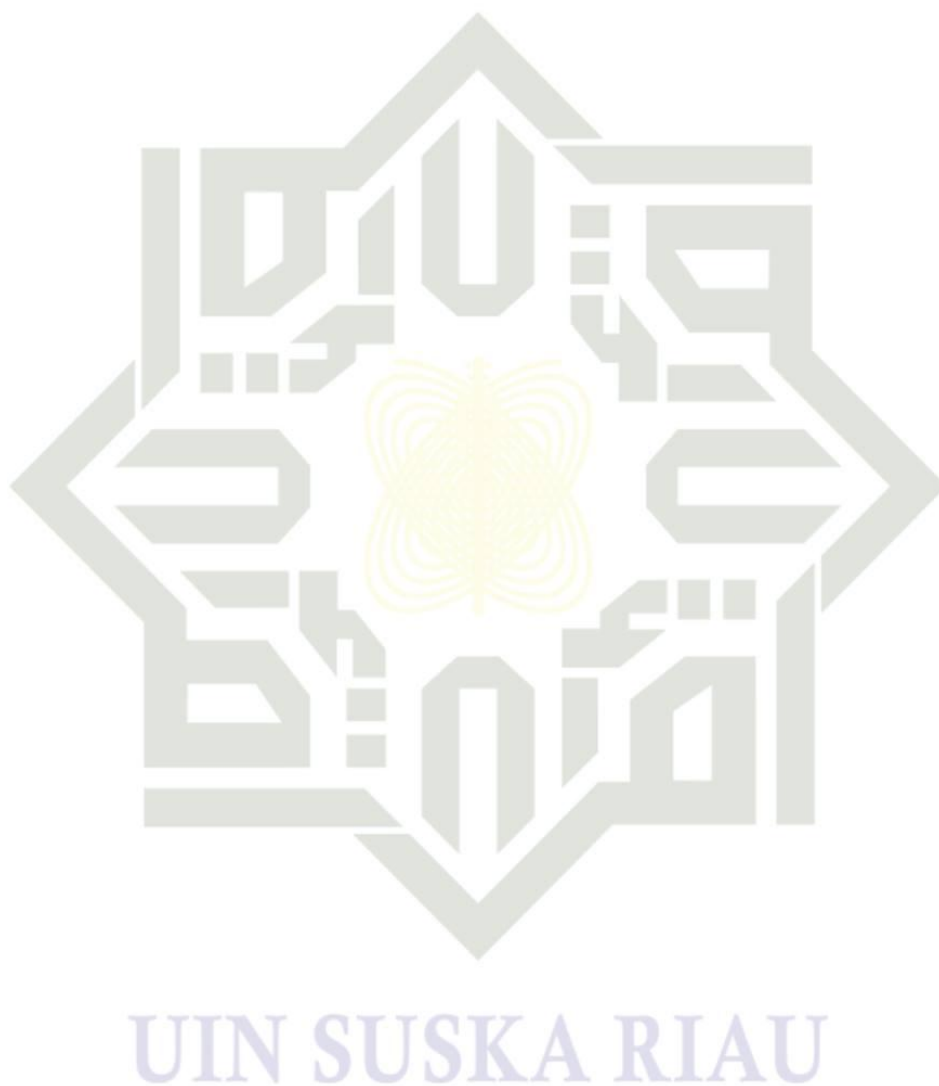
Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin yaitu: responden laki-laki sejumlah 47 orang atau 47%, kemudian untuk responden perempuan sebanyak 53 orang atau 53%, hanya berselisih 6 orang dari responden berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan.

Karakteristik responden dilihat pendidikan terakhir yaitu: responden dengan tingkat pendidikan terakhir S3 sebanyak 9 orang atau 9%, kemudian untuk responden S2 sebanyak 26 orang atau 26% dan untuk responden tamatan S1 sebanyak 45 orang atau 45%, sisanya 20 orang atau 20% dengan kategori pendidikan terakhir lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. Karakteristik responden dilihat status pernikahan yaitu: responden dengan status menikah sebanyak 64 orang atau 64%, kemudian untuk responden belum menikah sebanyak 24 orang atau 24% dan untuk responden dengan status pernikahan berpisah/bercerai sebanyak 12 orang atau 12%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh pelaksanaan tugas Kepala Desa terhadap perekonomian desa Teluk Pambang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan secara simultan, bahwa uji anova F memberikan nilai signifikan 0,000 ($p < 0,05$) karena tingkat nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, artinya secara bersama-sama pelaksanaan tugas kepala desa Teluk Pambang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian desa Teluk pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk variabel pelaksanaan tugas kepala desa nilai signifikannya adalah $0,000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepala desa berpengaruh terhadap perekonomian desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 100 sampel.
2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya satu variabel dependen saja yakni pelaksanaan tugas kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.3 Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis hendak memberikan beberapa saran antara lain:

1. Menggunakan kuesioner bersifat terbuka, sehingga para responden bisa menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain dari kuesioner bersifat pernyataan tertutup atau tertulis.
2. Memperluas responden pada aparat desa dan instansi terkait dengan perekonomian desa .
3. Menambahkan variabel independen lain selain dari pelaksanaan tugas kepala desa yang dapat mempengaruhi perekonomian desa misalnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa tersebut, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, 2001. *Pemerintahan Desa*. Bandung : Alfabeta.

Kartono, Kartini, 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo.

Kencana Safi'i, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Manulang, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ndraha, Talizuduhu, 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Siagian, Sondang P, 2005. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Gunung Agung.

-----, 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta : Ikhtiar Baru.

Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi, 2005. *Formulasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Suhartono, 2000. *Parlemen Desa*. Yogyakarta : Laperapustaka Utama.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Sulianti, 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : LP3ES.

Susran, Andi, 2007. *Desa Dalam Bingkai Pembangunan*. Pekanbaru : Suska Press.



Lampiran 1

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KUISIONER PENELITIAN
TENTANG
PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA TERHADAP
PEREKONOMIAN DESA TELUK PAMBANG KABUPATEN
BENGKALIS

Pengantar Angket

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Masyarakat
Desa Teluk Pambang

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA Riau, Fakultas Ekonomi. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan kestrataan Strata Satu Ilmu Administrasi Negara, maka saya memohon dengan segala hormat kepada Bapak/Ibu masyarakat Desa Teluk Pambang untuk mengisi angket yang telah disediakan.

Angket ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pertanyaan skripsi, maka dari itu informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan, kami harapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini, Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, November 2019

Muhammad Suwandv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IDENTITAS RESPONDEN MASYARAKAT DESA TELUK PAMBANG

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :

II. KRITERIA PENGISIAN KUISIONER

1. Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan pertanyaan dan berikan tanda (X)
2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata digunakan untuk mendapatkan data guna penyelesaian skripsi ini
3. Mohon kiranya dalam pengisian kuisioner ini Bapak/Ibu memberikan jawaban berdasarkan fakta yang ada
4. Atas perhatian dan kerjasama, Penulis mengucapkan terimakasih.

A. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

1. Kepala desa Teluk Pambang sudah memberikan saran dan masukan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada masyarakat

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Kepala desa Teluk Pambang sudah mengawasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sangat Tidak Setuju

Kepala desa Teluk Pambang sudah memotivasi masyarakat dalam meningkatkan sumber PAD

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Kepala Desa Teluk Pambang sudah membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di desa Teluk Pambang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Kepala desa Teluk Pambang sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMD

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Kepala desa Teluk Pambang sudah mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomiannya melalui pendirian BUMD

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Kepala Desa Teluk Pambang sudah Melakukan sosialisai pemberdayaan ekonomi masyarakat?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

B. Perekonomian Desa Teluk Pambang

8. Sudah adanya peluang-peluang mata pencaharian bagi masyarakat Desa Teluk Pambang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Sudah adanya peningkatan sektor-sektor ekonomi didesa Teluk Pambang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

9. Sudah adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat desaTeluk Pambang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

11. Sudah adanya pemerataan fasilitas kesehatan di desa Teluk Pambang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

12. Sudah adanya pemerataan secara ekonomi untuk setiap keluarga di desa Teluk Pambang

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju



LAMPIRAN 2. UJI VALIDITAS

Hak Cipta Dili

1. Dilarang m

a. Pengutip

b. Pengutip

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Correlations

		soal_1	soal_2	soal_3	soal_4	soal_5	soal_6	soal_7	total
soal_1	Pearson Correlation	1	.380**	.050	.050	.171	.007	.037	.361**
	Sig. (2-tailed)		.000	.618	.618	.089	.947	.717	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
soal_2	Pearson Correlation	.380**	1	.463**	.463**	.335**	.365**	.311**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
soal_3	Pearson Correlation	.050	.463**	1	1.000**	.135	.478**	.566**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.618	.000		.000	.182	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
soal_4	Pearson Correlation	.050	.463**	1.000**	1	.135	.478**	.566**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.618	.000	.000		.182	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
soal_5	Pearson Correlation	.171	.335**	.135	.135	1	-.256*	-.018	.338**
	Sig. (2-tailed)	.089	.001	.182	.182		.010	.862	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
soal_6	Pearson Correlation	.007	.365**	.478**	.478**	-.256*	1	.321**	.554**
	Sig. (2-tailed)	.947	.000	.000	.000	.010		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
soal_7	Pearson Correlation	.037	.311**	.566**	.566**	-.018	.321**	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.717	.002	.000	.000	.862	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
total	Pearson Correlation	.361**	.765**	.850**	.850**	.338**	.554**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

atau masalah.

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Correlations

		soal_1	soal_2	soal_3	soal_4	soal_5	total
soal_1	Pearson Correlation	1	.171	-.085	.093	.311**	.451**
	Sig. (2-tailed)		.088	.400	.357	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
soal_2	Pearson Correlation	.171	1	.613**	.616**	.635**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.088		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
soal_3	Pearson Correlation	-.085	.613**	1	.548**	.737**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.400	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
soal_4	Pearson Correlation	.093	.616**	.548**	1	.565**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.357	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
soal_5	Pearson Correlation	.311**	.635**	.737**	.565**	1	.894**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
total	Pearson Correlation	.451**	.816**	.749**	.746**	.894**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 3. UJI RELIABILITAS

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
soal_1	26.23	7.330	.175	.769
soal_2	26.31	5.549	.624	.675
soal_3	26.12	5.460	.764	.644
soal_4	26.12	5.460	.764	.644
soal_5	26.52	7.343	.121	.785
soal_6	26.34	6.530	.366	.737
soal_7	26.32	6.099	.473	.714

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta

UIN

UIN Syarif Kasim Riau

b. Perekonomian Desa Teluk Pambang

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
soal_1	16.90	5.141	.155	.865
soal_2	17.17	4.042	.692	.679
soal_3	17.10	4.293	.596	.713
soal_4	17.02	4.383	.603	.713
soal_5	17.09	3.456	.797	.627

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4. Uji Regresi dan Hipotesis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	30.66	2.858	100
Perkonomian Desa Teluk Pambang	21.32	2.510	100

Correlations

		persepsi_pengge lahan_pajak	pemahaman_per pajakan	diskriminasi_paja k	teknologi_perpaj akan
Pearson Correlation	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	1.000	.291	.374	.982
	Perkonomian Desa Teluk Pambang	.291	1.000	.297	.292
Sig. (1-tailed)	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	.	.002	.000	.000
	Perkonomian Desa Teluk Pambang	.002	.	.001	.002
N	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	100	100	100	100
	Perkonomian Desa Teluk Pambang	100	100	100	100

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.963	.962	.555

a. Predictors: (Constant), perekonomian desa

b. Dependent Variable: Pelaksanaan tugas kepala desa

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	778.889	3	259.630	843.445	.000 ^a
	Residual	29.551	96	.308		
	Total	808.440	99			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.439	.735		4.682	.000
	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	.006	.024	.005	.252	.802
	Perkonomian Desa Teluk Pambang	-.003	.038	-.002	-.086	.932

a. Dependent Variable: persepsi_penggelapan_pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	23.16	33.55	30.66	2.805	100
Std. Predicted Value	-2.675	1.029	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.059	.211	.104	.038	100
Adjusted Predicted Value	23.08	33.56	30.66	2.805	100
Residual	-1.413	.827	.000	.546	100
Std. Residual	-2.547	1.490	.000	.985	100
Stud. Residual	-2.565	1.570	.002	1.002	100
Deleted Residual	-1.433	.918	.002	.566	100
Stud. Deleted Residual	-2.644	1.583	.000	1.008	100
Mahal. Distance	.122	13.283	2.970	3.102	100
Cook's Distance	.002	.069	.009	.010	100
Centered Leverage Value	.001	.134	.030	.031	100



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANTAN
KEPALA DESA TELUK PAMBANG
JALAN JENDRAL SUDIRMAN DESA TELUK PAMBANG

E-Mail : Pemdestelukupambang@gmail.com Website : telukupambang.desa.id Kode Pos : 28763

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 410 / Pemdes-TP / IX / 2019 /

Kepala Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, Menerangkan

Nama : **MUHAMMAD SUWANDI**
NIM : 11375104692
Jurusan/Prodi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
Judul : Pengaruh Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis

Peneliti yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan judul : **Pengaruh Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Pambang, 09 September 2019

KEPALA DESA TELUK PAMBANG
KECAMATAN BANTAN



M. ALI B